

DESENTRALISASI ADMINISTRATIF DAN KINERJA PEMERINTAHAN: STUDI TATA KELOLA DESA DI PANGANDARAN

Dedeng Yusuf Maolani^{1)*}

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹⁾

*Email: dedeng@uinsgd.ac.id**

Riwayat Artikel

Diterima: 15 November 2024

Disetujui: 15 Desember 2024

Diterbitkan: 1 Januari 2025

Abstract

Administrative decentralization is a critical instrument in improving village governance, yet its effectiveness varies across regions. This study aims to analyze the relationship between public administration and the performance of village government in Pangandaran Village, Pangandaran Regency. Grounded in theories of good governance and public administration, this research adopts a descriptive qualitative approach using the library research method. Data were obtained from scholarly documents, regulations, and policy reports, and analyzed thematically and interpretively. The findings indicate that village government performance is influenced by the effectiveness of administrative functions such as planning, coordination, and public service delivery. These results emphasize the importance of adaptive, locally responsive administrative governance in strengthening village capacities. The study's main contribution lies in a conceptual synthesis that integrates theoretical perspectives with contextual village conditions to inform policy-making for local government empowerment.

Keywords: *Public Administration, Village Government Performance, Library Research*

Abstrak

Desentralisasi administratif merupakan instrumen penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, namun efektivitasnya masih beragam antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara administrasi negara dan kinerja pemerintahan desa di Desa Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Berlandaskan teori good governance dan administrasi publik, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari dokumen ilmiah, regulasi, dan laporan kebijakan yang dianalisis secara tematik dan interpretatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan desa dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan fungsi administrasi seperti perencanaan, koordinasi, dan pelayanan publik. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola administratif yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal dalam memperkuat kapasitas desa. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada sintesis konseptual yang mengintegrasikan perspektif teoritis dengan kondisi kontekstual desa sebagai dasar perumusan kebijakan pemberdayaan pemerintahan lokal.

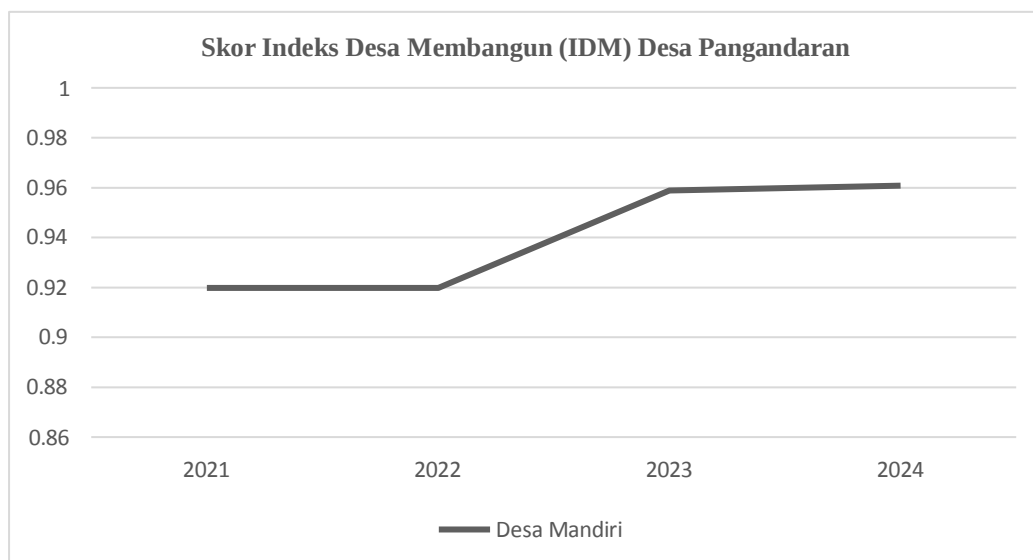
Kata kunci: Administrasi Negara, Kinerja Pemerintahan Desa, Studi Kepustakaan

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi di Indonesia membuka ruang bagi pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa, untuk menjalankan fungsi-fungsi administrasi secara lebih otonom. Proses ini menuntut kemampuan tata kelola yang adaptif terhadap kompleksitas kebutuhan lokal, sekaligus memastikan akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan (Engkus & Hanif, 2021; Robbins & Coulter, 2019). Dalam konteks ini, unsur

administrasi negara menjadi pondasi utama dalam membentuk struktur pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik (Aguilera & Cuervo- Cazurra, 2009; Ali et al., 2023; Daft & Lane, 2018).

Namun demikian, penguatan kapasitas administratif belum sepenuhnya menjadi fokus dalam agenda pembangunan di tingkat desa. Banyak desa mengalami peningkatan dalam indikator pembangunan fisik dan sosial, tetapi masih menghadapi kelemahan dalam aspek perencanaan, dokumentasi, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan program berbasis data (Ishak, Maolani, & Engkus, 2017b; Bazarah, Jubaidi, & Hubaib, 2021). Masalah-masalah administratif ini seringkali tidak tampak dalam penilaian kinerja formal, tetapi justru menjadi elemen yang menentukan keberhasilan program secara berkelanjutan (Nursam, 2017; Ruky, 2002; Rosyada, 2016).



Gambar 1. Grafik Tren Skor Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Pangandaran

Desa Pangandaran di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, merupakan salah satu contoh menarik dalam dinamika ini. Selama empat tahun terakhir, desa ini mempertahankan status sebagai desa mandiri dengan tren peningkatan skor Indeks Desa Membangun (IDM): 0,9198 pada 2021 dan 2022, naik menjadi 0,9589 di 2023 dan 0,9608 pada 2024. Peningkatan skor ini mencerminkan kemajuan dari sisi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, pencapaian tersebut belum otomatis mencerminkan keberfungsian sistem administrasi pemerintahan desa secara menyeluruh. Hal ini membuka ruang untuk melihat lebih dalam bagaimana unsur administrasi negara berperan dalam membentuk kualitas kinerja pemerintahan di tingkat desa (Zainal et al., 2017).

Penelitian oleh Wahid (2020) menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola desa sangat ditentukan oleh kemampuan administratif dalam mengelola anggaran dan partisipasi masyarakat secara simultan. Sementara itu, studi oleh Fitriani dan Subekti (2019) menekankan bahwa transparansi dalam administrasi desa memiliki korelasi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik dan kepuasan pelayanan. Penelitian lain oleh Rachman (2021) mengungkapkan bahwa peran kelembagaan dan kepemimpinan lokal sangat signifikan dalam meningkatkan responsivitas pemerintahan desa, terutama pada wilayah dengan status desa mandiri. Ketiga studi tersebut sama-sama menyoroti pentingnya administrasi yang tertata dalam menunjang kinerja pemerintahan lokal.

Persamaan antara penelitian ini dengan studi-studi terdahulu terletak pada perhatian terhadap pentingnya administrasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat umum atau berfokus pada beberapa

variabel administratif secara terpisah, penelitian ini menekankan pendekatan institusional secara menyeluruh, termasuk struktur birokrasi, praktik transparansi, serta mekanisme koordinasi antarlembaga desa dalam satu kerangka. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji hubungan antarvariabel secara deskriptif, tetapi juga membedahnya dalam konteks spesifik Desa Pangandaran yang telah berstatus desa mandiri dan memiliki sistem transparansi digital yang relatif maju.

Penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal berupa pemetaan hubungan antara desain administratif terdesentralisasi dengan kinerja tata kelola pemerintahan pada tingkat desa mandiri. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang bersifat multi-desa atau hanya menggunakan indikator makro, studi ini menggunakan pendekatan mikro-institusional yang memungkinkan penelusuran lebih mendalam terhadap dinamika internal pemerintahan desa. Penelitian ini juga memperkaya literatur dengan memasukkan variabel-variabel kelembagaan seperti pengaruh struktur organisasi desa dan integrasi sistem informasi publik dalam kinerja pelayanan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat. Desa Pangandaran yang telah menyandang status sebagai desa mandiri justru menjadi studi penting untuk menguji sejauh mana status tersebut tercermin dalam performa administratif dan output pelayanan publik. Temuan dari penelitian ini diharapkan tidak hanya berguna bagi pembuat kebijakan lokal, tetapi juga dapat menjadi basis perumusan kebijakan tata kelola desa di tingkat nasional, khususnya dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pasca-desentralisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi desentralisasi administratif terhadap kinerja pemerintahan desa, mengidentifikasi elemen-elemen kelembagaan yang berpengaruh dalam tata kelola Desa Pangandaran, serta menilai sejauh mana struktur administrasi internal mendukung efektivitas pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan desain kelembagaan desa yang lebih adaptif terhadap prinsip-prinsip *good governance*.

B. KAJIAN PUSTAKA

Good Governance

Inti dari pemahaman *Good Governance* terletak pada pemahaman prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip tersebut, kita dapat menilai kinerja suatu pemerintahan. Kualitas pemerintahan, baik atau buruk, bisa diukur apabila melibatkan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*. Mengingat pentingnya hal ini, UNDP (*United Nations Development Programme*) menguraikan sepuluh prinsip *Good Governance*, yang mencakup: partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, dan keterkaitan antar unsur-unsur tersebut. (Aguilera & Cuervo-Cazurra, 2009)

Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah upaya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah. Negara dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Secara mendasar, pemerintah (birokrasi) harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut (Bazarah et al., 2021).

Kinerja Pemerintahan

Menurut Hariandja, penilaian kinerja merupakan suatu proses dalam organisasi untuk menilai kinerja para karyawannya. Proses evaluasi ini juga mencakup aspek-aspek yang dinilai, yang dimulai dari kemampuan (ability), kepribadian (traits), perilaku (behavior), hingga hasil. (Nursam, 2017)

Teori Birokrasi Max Weber (1947)

Menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas dan sistematis dalam administrasi negara. Birokrasi yang efisien, dengan pembagian tugas yang jelas dan aturan yang terstruktur, memungkinkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih efektif dan meningkatkan akuntabilitas. Weber menyoroti bahwa birokrasi yang baik dapat membantu dalam pelaksanaan kebijakan secara konsisten dan terorganisir.(Ali et al., 2023)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai relasi antara administrasi negara dengan kinerja pemerintahan desa, khususnya di Desa Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Pendekatan ini dinilai tepat untuk menggali berbagai perspektif teoritis dan konseptual melalui analisis terhadap dokumen dan literatur yang telah tersedia (Moleong, 2013; Creswell, 2014). Fokus penelitian ini tidak pada data empiris lapangan, melainkan pada interpretasi atas wacana ilmiah dan kebijakan yang mendasari praktik administrasi pemerintahan desa.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi pemerintah dan lembaga yang relevan. Informasi dari literatur tersebut dipilih berdasarkan kredibilitas dan kesesuaiannya dengan tema yang dikaji, tanpa melibatkan informan melalui wawancara. Prosedur pengumpulan data dimulai dengan identifikasi dan seleksi literatur, dilanjutkan dengan pengkodean isi, pengorganisasian tema, serta penelaahan konteks secara mendalam (Zed, 2004). Dengan demikian, seluruh sumber data diperlakukan sebagai objek kajian utama dalam proses konstruksi pengetahuan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi secara tematik dan interpretatif untuk mengidentifikasi pola relasi antara aspek administrasi publik dan kinerja pemerintahan desa (Krippendorff, 2004). Proses ini dilakukan melalui kategorisasi data, penarikan makna kontekstual, dan pemaknaan teoretis yang relevan. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai literatur yang berbeda namun membahas topik serupa (Patton, 2002). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan sintesis konseptual yang bermakna dan kontributif bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Unsur Administrasi Negara dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

Administrasi negara merupakan sistem pengelolaan sumber daya dan proses pengambilan keputusan publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Dalam konteks desa, administrasi negara mencakup aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran desa, serta pelaporan kegiatan secara sistematis. Desa Pangandaran menunjukkan penerapan administrasi negara yang cukup kuat, terlihat dari adanya struktur kelembagaan desa yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara aktif, termasuk melalui pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) yang rutin, serta penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang partisipatif.

Penerapan prinsip administrasi negara juga tercermin dalam sistem pengelolaan pelayanan publik di Desa Pangandaran. Prosedur pelayanan administratif seperti pengurusan surat menyurat, pengajuan bantuan sosial, dan dokumentasi kependudukan telah dilakukan dengan standar operasional yang terukur. Hal ini menjadi indikator bahwa unsur administrasi tidak sekadar bersifat birokratis, tetapi juga mendukung kinerja pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Mekanisme pelaporan yang rapi, berbasis data, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan merupakan bentuk konkrit dari akuntabilitas administratif. Peningkatan skor IDM (Indeks Desa Membangun) Desa Pangandaran dari 0.9198 pada tahun 2021 menjadi 0.9608 pada tahun 2024 memperkuat bukti bahwa

implementasi unsur administrasi negara berdampak signifikan terhadap perkembangan desa. Aspek yang paling menonjol dalam peningkatan tersebut adalah dimensi pelayanan dasar dan penyelenggaraan pemerintahan desa, dua komponen yang secara langsung dipengaruhi oleh kualitas administrasi. Oleh karena itu, unsur administrasi negara bukan hanya fondasi, tetapi juga motor penggerak dalam mendorong efektivitas dan efisiensi tata kelola desa.

Hubungan Antara Administrasi Negara dan Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja pemerintah desa sangat berkorelasi dengan kualitas pelaksanaan administrasi negara di tingkat lokal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa desa yang mampu menjalankan fungsi-fungsi administrasi negara secara terstruktur cenderung memiliki performa yang lebih tinggi dalam memberikan pelayanan publik. Desa Pangandaran merupakan contoh bagaimana keberhasilan dalam manajemen administratif mampu menciptakan stabilitas program pembangunan serta menjaga kesinambungan kebijakan desa lintas periode pemerintahan.

Pemerintah Desa Pangandaran telah mengadopsi prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, yang merupakan bagian integral dari kerangka administrasi negara. Praktik tersebut ditunjukkan dengan keterbukaan informasi melalui papan data desa, laporan keuangan yang dapat diakses publik, serta mekanisme musyawarah terbuka untuk menetapkan prioritas pembangunan. Ini membuktikan bahwa semakin baik unsur administrasi dijalankan, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Temuan ini juga memperkuat pandangan bahwa keberhasilan pemerintahan desa tidak hanya bergantung pada kepemimpinan kepala desa, tetapi juga pada sistem kerja administratif yang berjalan di belakangnya. Pemerintah desa yang memiliki kapasitas perencanaan yang baik, didukung oleh sistem pengorganisasian sumber daya yang efisien dan pengawasan yang konsisten, akan lebih mampu mengelola konflik, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mengantisipasi perubahan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, hubungan antara administrasi negara dan kinerja pemerintah desa bersifat saling menguatkan dan tidak bisa dipisahkan.

Tantangan dan Strategi Peningkatan Kinerja Administratif

Meskipun capaian administratif Desa Pangandaran menunjukkan hasil positif, tantangan masih tetap ada, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang tata kelola. Tidak semua aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan administrasi publik atau pelatihan teknis yang relevan. Akibatnya, pelaksanaan program kerap menghadapi kendala teknis seperti keterlambatan laporan, kesalahan input data, dan kurangnya pemahaman terhadap indikator keberhasilan program pembangunan desa.

Tantangan lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses administrasi. Desa Pangandaran memang telah memiliki Sistem Informasi Desa (SID), namun implementasi belum berjalan maksimal karena keterbatasan perangkat dan kapasitas digital aparatur desa. Selain itu, beban administrasi manual masih cukup tinggi sehingga menyita waktu dan energi yang seharusnya bisa dialokasikan untuk aktivitas pelayanan langsung ke masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya efisiensi melalui digitalisasi layanan publik desa secara menyeluruh dan terintegrasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi peningkatan kinerja administratif desa harus bersifat sistemik. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelatihan manajemen publik bagi aparat desa, termasuk peningkatan literasi digital dan pemahaman tata kelola berbasis data. Selain itu, pembaharuan SOP desa agar lebih adaptif terhadap kondisi lokal dan partisipatif juga dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas administrasi. Kolaborasi antara desa dengan perguruan tinggi atau LSM juga dapat menjadi solusi untuk mendampingi reformasi administratif secara berkelanjutan. Strategi pemerintah desa untuk peningkatan kinerja administratif sebagai berikut:

Penguatan Kapasitas Aparatur Desa:

- Menyelenggarakan pelatihan rutin tentang tata kelola pemerintahan desa.
- Mengembangkan program mentoring bagi perangkat baru dengan melibatkan aparatur desa senior atau mitra akademik.
- Mendorong sertifikasi kompetensi bagi aparatur desa melalui lembaga pelatihan formal.

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi:

- Meningkatkan infrastruktur digital desa, termasuk perangkat keras dan konektivitas internet.
- Melakukan pelatihan teknis penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) secara berkala.
- Mengintegrasikan layanan administrasi ke dalam sistem digital untuk mengurangi beban kerja manual.

Reformasi Tata Kelola dan Kolaborasi Multipihak:

- Melakukan revisi SOP (Standard Operating Procedure) desa dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual.
- Membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, LSM, dan pihak swasta untuk pendampingan dan inovasi tata kelola.
- Menyusun rencana jangka menengah penguatan manajemen desa dengan fokus pada efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang responsif.

Penguatan Temuan Penelitian

Temuan dalam penelitian ini memperkuat gagasan Sulistiyono (2020) bahwa tata kelola desa yang ditopang oleh administrasi yang kuat berperan penting dalam mendorong partisipasi warga dan efektivitas kebijakan pembangunan. Hal ini terlihat dalam konteks Desa Pangandaran, di mana proses administratif yang tertib mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa dan memperlancar pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, konsistensi pencapaian indikator administratif dalam Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan bahwa administrasi bukan sekadar aktivitas dokumentatif, melainkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat legitimasi pemerintah desa.

Penelitian ini juga mendukung argumen Dwiyanto (2018), yang menyebutkan bahwa kinerja pemerintah desa sangat tergantung pada kapasitas administratif dan kemampuan birokrasi dalam memahami kebutuhan masyarakat. Namun, kontribusi baru dari penelitian ini terletak pada pengungkapan dimensi sosial dalam tata kelola administratif desa. Dalam kasus Desa Pangandaran, keterlibatan emosional dan kedekatan sosial antara aparat desa dan warga seperti dalam bentuk komunikasi informal, budaya gotong royong, dan kepercayaan kolektif menjadi faktor pelengkap yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi. Aspek ini jarang disentuh secara eksplisit dalam kajian-kajian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek teknokratis dan struktural.

Selain itu, dalam menganalisis data IDM dari tahun ke tahun menjadi pembeda antara penelitian ini dengan studi sebelumnya yang umumnya bersifat cross-sectional. Dengan menelusuri tren capaian IDM selama lima tahun terakhir, penelitian ini mampu menangkap dinamika perubahan secara lebih akurat dan menyajikan bukti empirik yang lebih kuat terhadap dampak reformasi administrasi desa. Strategi ini juga memungkinkan penelusuran pola konsistensi atau anomali dalam kinerja administratif, yang dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan peningkatan kapasitas desa yang lebih kontekstual dan berbasis data.

Rekomendasi Temuan

Optimalisasi Pelatihan Aparatur Desa

Pemerintah daerah perlu menginisiasi dan mengelola program pelatihan aparatur desa secara berkala untuk meningkatkan kapasitas administratif. Pelatihan ini sebaiknya tidak hanya bersifat formal dan teknis, tetapi juga menekankan pada penguatan kemampuan dalam perencanaan partisipatif, manajemen anggaran berbasis kinerja, serta evaluasi program yang

berorientasi pada hasil. Dengan pelatihan yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan lapangan, kapasitas birokrasi desa akan lebih siap dalam menghadapi tantangan tata kelola lokal yang dinamis. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa kinerja administratif yang baik tidak hanya ditentukan oleh pengalaman, tetapi juga oleh pembelajaran berkelanjutan (Dwiyanto, 2018).

Penguatan Sistem Informasi Desa (SID)

Untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik, Desa Pangandaran perlu memperkuat Sistem Informasi Desa (SID) berbasis digital. Pengembangan platform pelayanan yang terintegrasi tidak hanya akan mempercepat alur pelayanan administratif, tetapi juga membuka ruang partisipasi warga dalam pengawasan dan pelaporan kinerja aparatur. Sistem ini dapat mencakup fitur-fitur seperti layanan surat menyurat online, pelaporan kegiatan desa, dan pengaduan masyarakat yang mudah diakses. Transformasi digital ini penting untuk mendorong tata kelola desa yang lebih terbuka dan akuntabel, sebagaimana juga telah didorong oleh kebijakan nasional mengenai desa digital (Kemendesa PDTT, 2023).

Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Terukur

Pemerintah desa disarankan untuk mengembangkan sistem evaluasi kinerja berbasis indikator yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome). Indikator ini perlu disesuaikan dengan tujuan pembangunan desa, seperti peningkatan kualitas layanan, kepuasan warga, dan kemajuan indikator IDM. Evaluasi ini harus dilakukan secara periodik dan dikaitkan dengan sistem insentif atau pembinaan kapasitas aparatur desa, agar tercipta mekanisme pengawasan dan motivasi internal yang kuat. Dengan demikian, pengambilan keputusan tidak hanya berbasis pada persepsi, tetapi didasarkan pada data dan hasil yang terukur secara objektif.

Penyusunan SOP yang Responsif dan Kontekstual

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun dengan pendekatan responsif dan kontekstual terhadap karakteristik sosial-budaya lokal. SOP yang terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan realitas masyarakat justru akan menciptakan jarak antara aparat dan warga. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan SOP, sehingga prosedur yang dihasilkan tetap menjaga prinsip efisiensi dan akuntabilitas, namun juga lentur dalam pelaksanaan. Pendekatan ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat desa.

Pengembangan Sistem Pengaduan Terintegrasi

Mekanisme pengaduan masyarakat perlu dirancang secara terintegrasi ke dalam sistem administrasi desa untuk menciptakan pemerintahan yang adaptif dan akuntabel. Sistem ini dapat berupa kanal digital, kotak saran fisik, hingga forum tatap muka berkala yang diatur dalam siklus pelayanan publik. Pengaduan yang masuk harus dikelola dengan prinsip kecepatan tanggapan, kerahasiaan pelapor, dan tindak lanjut yang jelas. Dengan adanya sistem ini, pemerintah desa dapat secara aktif mendeteksi kelemahan layanan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip *continuous improvement* dalam administrasi publik modern.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola administratif di Desa Pangandaran menunjukkan keterkaitan kuat antara kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat, yang secara langsung berdampak pada pencapaian indikator kinerja pembangunan desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa kedekatan sosial antara aparat dan warga menjadi kekuatan nonformal yang memperkuat efektivitas pelayanan publik, melampaui pendekatan birokrasi formal semata. Pentingnya integrasi aspek administratif, sosial, dan digital dalam tata kelola desa.

Kontribusi utama dari studi ini terletak pada pendekatan longitudinal terhadap data IDM dan identifikasi dimensi hubungan sosial sebagai variabel penting yang selama ini kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan pelatihan aparatur desa secara kontekstual, memperkuat sistem informasi desa berbasis digital, dan menyusun indikator kinerja serta SOP yang responsif terhadap karakter lokal. Untuk penelitian lanjutan, pendekatan etnografis dan partisipatif dapat dikembangkan guna menggali dinamika relasi sosial yang lebih mendalam, dengan memperluas wilayah studi dan memperhatikan faktor politik lokal. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup studi kasus tunggal, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Implikasinya, pembuat kebijakan desa perlu merumuskan kebijakan berbasis data dan hubungan sosial masyarakat guna menciptakan tata kelola desa yang inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Aguilera, R. V., & Cuervo-Cazurra, A. (2009). Codes of good governance. *Corporate Governance: An International Review*, 17(3), 376–387. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2009.00737.x>
- Ali, M., Luthfi, M. K., Mustopa, M., Oiwo, M. F., & Nasor, M. (2023). Pendekatan Max Weber: Birokrasi serta Struktur Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 2134–2145.
- Bazarah, J., Jubaidi, A., & Hubaib, F. (2021). Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 22(2), 105–122.
- Daft, R. L., & Lane, P. G. (2018). *The leadership experience* (Vol. 53). Boston, MA: Cengage Learning.
- Engkus, A. R. A., & Hanif, A. T. F. (2021). *Buku Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Dialektika*, 19(1), 1–361.
- Ishak, D., Maolani, D. Y., & Engkus, E. (2017). Konsep Kinerja Dalam Studi Organisasi Publik. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 101–120.
- Managerial, K. I., & Mintzberg, H. (2020). *Journal of Leadership in Organizations*, 2(2), 75–90.
- Nugroho, T. A. (2020). Evaluasi Struktur Organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 43–60.
- Nursam, N. (2017). *Manajemen kinerja. Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 2(2).
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2019). *Manajemen*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Rosyada, A. A. (2016). Inti dari pemahaman Good Governance terletak pada pemahaman prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 102–114.
- Ruky, A. S. (2002). *Sistem manajemen kinerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukmana, F. H., Hamdi, H., & Maryanti, S. (2020). Menilai Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Survei Persepsi Publik. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 287–315.
- Zainal, M., Suworo, U., Mariana, D., & Redjo, S. I. (2017). Governance of forest and peatland fire prevention in Riau Province. *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)*, 122–125.